PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

UNIT KERJA : **DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IDA INDRAYANI ACHMAL**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **1000708**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 526.072.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 956 m2/384 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 78.392.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/105 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 197.680.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 65.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 2.000.000**

F. HARTA LAINNYA — **Rp. ----**

Sub Total	**Rp.**	**593.072.000**
III. HUTANG	**Rp.**	**157.000.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**436.072.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.